

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 730-741
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14474615>

Efektivitas Program Keluarga Harapan: Realitas Pelaksanaan dan Tantangan Dalam Mencapai Target Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan

Christiana Messy Charoline¹, Tiara Ratna Sari², Yohana Ester Sartio Siburian³, Hairani Siregar⁴

¹²³⁴Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi masalah yang kompleks di Kota Medan, ditandai dengan urbanisasi yang signifikan dan kesenjangan ekonomi. Pemerintah Indonesia memperkenalkan program Bantuan Tunai Bersyarat (Bansos), yang dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan akses keluarga berpenghasilan rendah ke layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Studi ini menganalisis efektivitas pelaksanaan PKH di Medan, dengan fokus pada dampak dan tantangannya. Metode penelitian kualitatif digunakan, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para penerima manfaat program. Data dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun PKH secara signifikan mengurangi beban ekonomi dan memfasilitasi akses terhadap layanan dasar, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk keterlambatan pencairan, penargetan yang tidak akurat, dan terbatasnya panduan bagi penerima manfaat dalam memanfaatkan dana secara efektif. Masalah-masalah ini menghambat keberlanjutan program dan dampak yang lebih luas terhadap penanggulangan kemiskinan. Studi ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan pemberdayaan penerima manfaat, yang bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam inisiatif pengentasan kemiskinan di perkotaan.

Kata kunci: Pengentasan Kemiskinan, Bantuan Tunai Bersyarat, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Masyarakat Perkotaan, Efektivitas Kebijakan

Abstract

Poverty remains a complex issue in Medan, characterized by significant urbanization and economic disparities. The Indonesian government introduced the Conditional Cash Transfer program, known as Program Keluarga Harapan (PKH), to alleviate poverty by improving access for low-income families to education, health, and social services. This study analyzes the effectiveness of PKH implementation in Medan, focusing on its impacts and challenges. A qualitative research method was employed, with data collected through in-depth interviews with program beneficiaries. The data were analyzed using an interactive analysis model. The findings reveal that while PKH significantly reduces economic burdens and facilitates access to basic services, challenges persist, including delayed disbursements, inaccurate targeting, and limited guidance for beneficiaries on effective fund utilization. These issues hinder the program's sustainability and broader impact on poverty reduction. This study provides recommendations to improve targeting accuracy, transparency, and beneficiary empowerment, aiming for better outcomes in urban poverty alleviation initiatives.

Keywords: Poverty Alleviation, Conditional Cash Transfer, Program Keluarga Harapan, Urban Welfare, Policy Effectiveness

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang masih menjadi fokus utama kebijakan sosial di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup akses yang terbatas terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya (Syaifulloh, 2008). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi standar kebutuhan minimum, baik dalam bentuk makanan maupun non-makanan, yang dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Pada Maret 2022, angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebanyak 26,16 juta jiwa, atau sekitar 9,71% dari total penduduk, menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun tetap memprihatinkan (BPS, 2022).

Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi dengan populasi besar, mencatat tingkat

kemiskinan sebesar 8,42% pada September 2023, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 1,24 juta jiwa (BPS Sumatera Utara, 2023). Kota Medan, sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di provinsi ini, tidak terlepas dari masalah tersebut. Menurut data terbaru, tingkat kemiskinan di Kota Medan mencapai 7,13%, dengan sebagian besar penduduk miskin tinggal di kawasan pinggiran kota yang kurang terlayani oleh infrastruktur dasar (BPS Medan, 2024). Faktor-faktor seperti urbanisasi, ketimpangan pendapatan, dan rendahnya akses terhadap lapangan kerja turut memperburuk situasi ini (Rizka Anggun Fadhillah et al., 2019).

Dalam rangka mengurangi kemiskinan, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007 sebagai bagian dari strategi perlindungan sosial. PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dengan memberikan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial RI, 2016). Program ini dikenal secara internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT) dan diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar-generasi. Sasaran utama PKH meliputi ibu hamil, anak usia sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia yang memenuhi kriteria tertentu (Kementerian Sosial, 2020).

Di Kota Medan, implementasi PKH telah menunjukkan hasil yang bervariasi. Berdasarkan laporan Dinas Sosial Kota Medan, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 120.000 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, yang tersebar di berbagai kecamatan seperti Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Tembung (Dinas Sosial Medan, 2023). Bantuan tunai yang diberikan bervariasi sesuai dengan jumlah dan kebutuhan anggota keluarga, mulai dari Rp900.000 hingga Rp3.000.000 per tahun. Meski program ini diakui mampu meringankan beban ekonomi penerima manfaat, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti ketepatan sasaran, keterlambatan pencairan dana, dan kurangnya pendampingan intensif bagi keluarga penerima (Karina Dalimunthe & Kariaman Sinaga, 2019).

Kemiskinan di Kota Medan memiliki karakteristik yang unik dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Sebagian besar keluarga miskin di kota ini berprofesi sebagai pekerja informal, seperti buruh lepas, pedagang kaki lima, atau nelayan, dengan pendapatan tidak tetap dan rentan terhadap fluktuasi ekonomi (Rizka Anggun Fadhillah et al., 2019). Selain itu, urbanisasi yang cepat telah menyebabkan peningkatan permukiman kumuh di wilayah pinggiran, di mana akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan masih sangat terbatas. Kondisi ini semakin mempertegas pentingnya PKH sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di perkotaan.

Namun, implementasi PKH di Medan tidak lepas dari kritik. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa beberapa penerima manfaat mengeluhkan keterlambatan pencairan dana yang mengganggu perencanaan keuangan mereka. Selain itu, mekanisme pendataan yang masih menggunakan basis data lama sering kali menyebabkan ketidaktepatan sasaran, di mana keluarga yang tidak memenuhi kriteria tetap menerima bantuan, sementara keluarga miskin yang layak justru terabaikan (Karina Dalimunthe & Kariaman Sinaga, 2019). Kurangnya transparansi dalam pengelolaan program ini juga menjadi perhatian utama, terutama dalam hal distribusi bantuan di tingkat kelurahan.

Di sisi lain, peran pendamping PKH yang seharusnya menjadi ujung tombak pelaksanaan program juga masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kompetensi dan kurangnya pelatihan. Pendamping PKH tidak hanya bertugas memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, tetapi juga memberikan edukasi kepada penerima manfaat tentang cara memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan yang produktif, seperti pendidikan dan kesehatan (Rizka Anggun Fadhillah et al., 2019). Dalam praktiknya, beban kerja pendamping sering kali tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat yang harus mereka tangani, sehingga mengurangi efektivitas pendampingan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan di Kota Medan, dengan fokus pada realitas pelaksanaan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai target pengentasan kemiskinan. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana PKH mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga miskin, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilannya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan implementasi PKH, tidak hanya di Medan tetapi juga di wilayah perkotaan lainnya. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul "Efektivitas Program Keluarga Harapan: Realitas Pelaksanaan dan Tantangan Dalam Mencapai Target Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan" untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan ini secara

menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami realitas serta tantangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Medan. Penelitian ini memfokuskan pada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai objek penelitian dan mengkaji aspek realitas serta hambatan yang dihadapi dalam mencapai target pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Esterberg (2002), wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui percakapan antara peneliti dan informan yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam, memungkinkan peneliti memahami pengalaman dan perspektif orang lain, sehingga menghasilkan data yang lebih mendalam dan kontekstual. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan melalui panggilan video pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan Ibu Ngatini selaku penerima Program Keluarga Harapan untuk menggali informasi terkait realitas pelaksanaan dan tantangan dalam mencapai target pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis model interaktif yang menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011), ada tahapan yang harus dilalui yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

HASIL

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Medan, sebagaimana yang tergambar dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan grafik tingkat kemiskinan Kota Medan dari tahun 2015 hingga 2024, tren menunjukkan penurunan yang signifikan dari 9,8% pada tahun 2015 menjadi 7,13% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan dampak dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk program-program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di Kota Medan masih menjadi perhatian serius, terutama dengan karakteristik urbanisasi yang tinggi dan ketimpangan ekonomi yang signifikan antara kelompok masyarakat menengah ke atas dan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.



Gambar 1.1 Grafik Tingkat Kemiskinan Kota Medan (2015-2024)

Grafik di atas menunjukkan tren tingkat kemiskinan di Kota Medan dari tahun 2015 hingga 2024. Berdasarkan data, tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 9,8% pada tahun 2015 menjadi 7,13% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan berbagai upaya pemerintah, termasuk implementasi program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, fluktuasi kecil terlihat pada tahun 2020, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat sementara.

PKH adalah salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat. Program ini dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di Kota Medan, berdasarkan data Kementerian Sosial (2023), terdapat lebih dari

120.000 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di berbagai kecamatan. Komponen bantuan PKH mencakup beberapa kategori, seperti bantuan untuk ibu hamil, anak usia sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat. Nominal bantuan yang diberikan bervariasi berdasarkan komponen tersebut, dengan rata-rata dana yang dicairkan sebesar Rp900.000 hingga Rp3.000.000 per tahun, yang diterima secara bertahap setiap tiga bulan sekali.

Hasil wawancara dengan salah satu penerima manfaat PKH, Ibu Ngatini, memberikan informasi mendalam tentang implementasi program ini di tingkat rumah tangga. Ibu Ngatini telah menjadi penerima manfaat sejak tahun 2010. Sebagai seorang ibu rumah tangga dengan tiga anggota keluarga, ia mengungkapkan bahwa bantuan yang diterima telah membantu meringankan beban ekonomi keluarganya, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Ia menyebutkan bahwa anak yang masih bersekolah di SMA menerima bantuan Rp1 juta per tahun, sedangkan anak yang masih di SD menerima Rp450 ribu per tiga bulan. Dana ini digunakan untuk biaya sekolah seperti pembelian seragam, buku, dan perlengkapan lainnya, serta kebutuhan sehari-hari.

Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Ibu Ngatini dalam pelaksanaan program ini. Salah satu masalah utama adalah keterlambatan pencairan dana, yang sering kali membuat perencanaan keuangan keluarga menjadi sulit. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa tidak ada pendampingan atau pengarahan khusus dari pihak terkait tentang cara memanfaatkan dana bantuan untuk kegiatan yang lebih produktif. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam aspek pendampingan yang seharusnya menjadi bagian penting dari PKH, sesuai dengan pedoman pelaksanaan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (2020). Kendala lain yang diungkapkan adalah masalah ketidaktepatan sasaran. Ibu Ngatini menyebutkan bahwa ada beberapa kasus di mana penerima manfaat PKH tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, sementara keluarga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar dalam program ini. Masalah ini mencerminkan perlunya peningkatan dalam mekanisme pendataan dan verifikasi untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa meskipun bantuan PKH membantu meringankan beban ekonomi, jumlah bantuan yang diberikan masih dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Ibu Ngatini menambahkan bahwa meskipun bantuan ini memberikan manfaat jangka pendek, seperti akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, program ini belum sepenuhnya memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa PKH lebih berfokus pada pengentasan kemiskinan sementara, tanpa memberikan solusi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat (Karina Dalimunthe & Kariaman Sinaga, 2019).

PEMBAHASAN

Dampak Program Keluarga Harapan terhadap Pengurangan Kemiskinan

Program Keluarga Harapan (PKH) telah memainkan peran signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Medan. Berdasarkan data empiris, tingkat kemiskinan di Kota Medan mengalami penurunan dari 9,8% pada tahun 2015 menjadi 7,13% pada tahun 2024, dengan kontribusi nyata dari program ini dalam membantu keluarga miskin mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan efektivitas program dalam mendorong perbaikan kualitas hidup keluarga penerima manfaat (KPM), meskipun berbagai tantangan masih ada.

Peningkatan Akses Pendidikan

PKH secara langsung meningkatkan akses anak-anak dari keluarga miskin terhadap pendidikan. Menurut wawancara dengan Ibu Ngatini, salah satu KPM di Kota Medan, bantuan yang diterima dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya, seperti pembelian seragam, buku, dan biaya sekolah. Bantuan ini secara khusus diberikan kepada anak-anak yang masih dalam usia sekolah dengan nominal Rp1 juta per tahun untuk tingkat SMA dan Rp450 ribu per tiga bulan untuk tingkat SD. Penelitian sebelumnya juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa hampir seluruh anak penerima manfaat PKH dapat mengikuti pendidikan dengan tingkat kehadiran minimal 85%. Namun, meskipun bantuan ini membantu mengurangi beban biaya pendidikan, tantangan tetap ada. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah ketepatan waktu pencairan dana. Ibu Ngatini mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan sering kali mengganggu perencanaan keuangan

keluarga, terutama dalam membayar kebutuhan pendidikan secara tepat waktu. Selain itu, jumlah bantuan yang dianggap tidak mencukupi menjadi kendala lain dalam mendukung kebutuhan pendidikan yang lebih kompleks, seperti biaya bimbingan belajar atau pembelian perangkat teknologi pendukung.

Peningkatan Kesehatan Keluarga

PKH juga memberikan dampak signifikan terhadap akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan. Dengan menjadi penerima PKH, keluarga secara otomatis terdaftar dalam program jaminan sosial pemerintah seperti BPJS, yang memudahkan mereka mengakses layanan kesehatan dasar. Dalam kasus Ibu Ngatini, bantuan PKH memungkinkan keluarganya untuk mendapatkan layanan kesehatan, termasuk imunisasi anak dan pemeriksaan kehamilan, tanpa kendala biaya. Meskipun demikian, program ini juga menghadapi kritik, terutama dalam aspek pendampingan. Berdasarkan wawancara, tidak ada pendampingan intensif dari pihak terkait untuk memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pemanfaatan bantuan secara lebih produktif. Pendamping PKH seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa bantuan tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak, tetapi juga untuk mendukung upaya kemandirian ekonomi keluarga.

Ketepatan Sasaran dan Efisiensi Administrasi dalam Pelaksanaan Program

Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran penerima manfaat merupakan salah satu indikator utama efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan wawancara dengan penerima manfaat di Kota Medan, salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah adanya ketidaksesuaian data penerima manfaat. Data penerima sering kali menggunakan basis data lama, sehingga menyebabkan beberapa keluarga yang tidak memenuhi kriteria tetap menerima bantuan, sedangkan keluarga miskin lainnya yang memenuhi syarat tidak terdaftar (Karina, 2019). Masalah ini juga terlihat di tingkat nasional, di mana mekanisme penetapan sasaran masih sering bersifat top-down tanpa mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan, sebagaimana dicontohkan dalam penelitian sebelumnya di Kabupaten Aceh Barat (Yulia, 2023).

Berdasarkan temuan di Kelurahan Belawan II, Medan, peserta PKH secara umum telah menerima bantuan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan tanpa potongan. Namun, sekitar 10% penerima menyatakan bahwa bantuan yang diterima masih belum mencukupi kebutuhan dasar mereka, mengindikasikan perlunya perbaikan alokasi dan pengelolaan data penerima manfaat (Karina, 2019). Ketepatan sasaran juga berhubungan erat dengan mekanisme validasi data yang seharusnya melibatkan pihak-pihak lokal seperti perangkat desa atau kelurahan untuk memastikan bahwa bantuan mencapai keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Efisiensi Administrasi

Efisiensi administrasi dalam pelaksanaan PKH di Kota Medan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama yang diungkapkan adalah prosedur administrasi yang sering kali berbelit-belit dan membutuhkan waktu lama. Hal ini sebagian disebabkan oleh jumlah pendamping PKH yang tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat, sehingga beban kerja pendamping menjadi sangat tinggi (Fitri, 2020). Akibatnya, verifikasi komitmen penerima dan proses pencairan bantuan menjadi tidak optimal. Pendamping PKH, yang seharusnya menjadi ujung tombak pelaksanaan program, juga menghadapi tantangan lain, seperti minimnya pelatihan dan kurangnya sumber daya pendukung.

Berdasarkan wawancara, beberapa penerima manfaat mengungkapkan bahwa pendamping PKH kurang memberikan edukasi tentang cara memanfaatkan bantuan secara produktif. Di sisi lain, sistem pencairan dana yang dilakukan melalui bank atau e-warung dinilai cukup efisien karena mengurangi potensi penyelewengan, tetapi tetap memerlukan peningkatan dalam pengelolaan antrian dan distribusi dana. Berdasarkan analisis ini, beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan adalah:

1. Pembaruan Data secara Berkala: Mengadopsi sistem verifikasi berbasis teknologi untuk memastikan data penerima manfaat selalu mutakhir dan akurat.
2. Pelatihan Pendamping PKH: Menyediakan pelatihan rutin bagi pendamping PKH untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan edukasi kepada penerima manfaat.
3. Optimalisasi Sistem Administrasi: Mengembangkan aplikasi yang memungkinkan pendamping dan penerima manfaat untuk mengakses informasi program secara real-time, sehingga mengurangi hambatan administratif.

4. Pelibatan Pemangku Kepentingan Lokal: Menguatkan kerja sama dengan perangkat desa atau kelurahan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan kebutuhan lokal

Kelemahan dalam Aspek Pendampingan dan Pemanfaatan Dana Bantuan

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Medan telah memberikan manfaat nyata bagi banyak keluarga penerima manfaat. Namun, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kendala yang mencerminkan kelemahan sistemik. Salah satu isu utama adalah kurangnya pemantauan menyeluruh terhadap penerapan program, sehingga ada penerima manfaat yang tidak layak namun tetap terdaftar. Kelemahan-kelemahan PKH yang ditemukan di Kota Medan memiliki beberapa ciri khas yang perlu mendapat perhatian. Sebagai kota besar dengan tingkat urbanisasi tinggi, banyak penerima manfaat yang tinggal di daerah padat penduduk dengan akses yang terbatas terhadap fasilitas pendukung, seperti tempat pelatihan keterampilan atau layanan pendampingan. Selain itu, sistem pendataan penerima manfaat di Medan sering kali tidak terintegrasi dengan baik, sehingga ada penerima yang tidak layak tetap terdaftar, sementara yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan.

Stigma sosial terhadap penerima PKH di Kota Medan juga lebih terasa dibandingkan dengan daerah pedesaan. Penerima sering kali dicap malas atau bergantung pada bantuan, yang dapat memengaruhi psikologis mereka. Pendampingan yang seharusnya menjadi komponen integral program masih sangat minim, sehingga penerima manfaat sering kali kebingungan dalam memanfaatkan dana secara strategis. Keterlambatan pencairan dana, prosedur yang tidak transparan, serta kurangnya dukungan untuk meningkatkan kemandirian penerima manfaat menjadi masalah utama yang sering ditemui. Masalah-masalah ini tidak hanya membatasi efektivitas program, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Begitupula dengan hasil diskusi kami dengan Ibu N pengguna program PKH tersebut di Kota Medan yang menjelaskan sisi kelemahan dari program tersebut selama ibu N menggunakannya:

1. Kurangnya Pendampingan bagi Penerima Manfaat

Minimnya pendampingan menjadi kelemahan utama dalam pelaksanaan PKH. Ibu Ngatini menyebutkan bahwa ia tidak pernah menerima pengarahan atau pelatihan tentang bagaimana memanfaatkan dana bantuan dengan bijak. Ketiadaan pendampingan ini menyebabkan banyak penerima manfaat tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang prioritas alokasi dana. Sebagai contoh, dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan atau kesehatan sering kali habis untuk kebutuhan sehari-hari tanpa rencana jangka panjang, dan akhirnya membuat penerima tidak sepenuhnya mempersiapkan untuk mandiri secara ekonomi. (Kaban, 2021)

2. Dana Bantuan Hanya Cukup untuk Kebutuhan Dasar

Dana bantuan yang diterima Ibu Ngatini sebagian besar hanya cukup untuk kebutuhan dasar, seperti biaya pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Meskipun manfaatnya terasa, dana ini belum mampu mendorong penerima untuk berkembang secara ekonomi, misalnya dengan memulai usaha kecil-kecilan, tentu menandakan bahwa program masih berfokus pada kebutuhan darurat tanpa strategi pemberdayaan jangka Panjang. Walaupun bantuan PKH dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar, dana yang diterima oleh keluarga seperti Ibu Ngatini tidak cukup untuk mendukung pengembangan usaha kecil atau meningkatkan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Penelitian di Kecamatan Medan Belawan juga menunjukkan bahwa meskipun bantuan pendidikan PKH ada, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak penerima manfaat (Kaban, 2021).

3. Keterlambatan Pencairan Dana

Keterlambatan pencairan dana menjadi masalah yang sering dihadapi oleh penerima PKH. Ibu Ngatini sendiri mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan dana menyulitkannya dalam merencanakan pengeluaran keluarga. Berdasarkan laporan Dinas Sosial Kota Medan, pencairan dana bantuan PKH seringkali tidak tepat waktu, yang berdampak pada ketidakpastian penerima dalam memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan atau kesehatan (Suara USU, 2024). Keterlambatan ini menambah beban ekonomi bagi penerima, karena mereka tidak dapat memprediksi kapan dana akan tersedia.

4. Kurangnya Transparansi dalam Proses Distribusi

Minimnya transparansi dalam distribusi dana bantuan menimbulkan berbagai masalah,

termasuk ketidakpuasan penerima manfaat. Ibu Ngatini menyebutkan bahwa ada penerima yang tidak layak namun tetap terdaftar sebagai penerima bantuan. Dengan begitu adanya kelemahan dalam proses pendataan dan verifikasi. Selain itu, penerima sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai hak mereka, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap program.

5. Ketergantungan pada Bantuan Sosial

Tanpa adanya pelatihan atau edukasi finansial, penerima manfaat seperti Ibu Ngatini cenderung bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini berisiko menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus. Program ini seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai bantuan langsung, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan untuk mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat.

6. Kurangnya Pengawasan terhadap Implementasi Program

Kelemahan lain yang diungkapkan oleh Ibu Ngatini adalah kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan program. Praktik-praktik seperti pemotongan dana oleh pihak tertentu sering terdengar di lapangan. Selain itu, data penerima manfaat yang tidak akurat menyebabkan bantuan tidak selalu tepat sasaran. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi. Kelemahan-kelemahan tersebut menggambarkan perlunya perbaikan pada aspek pendampingan, baik dalam bentuk pelatihan maupun edukasi finansial, agar penerima manfaat mampu memanfaatkan bantuan secara lebih strategis. Pendampingan yang intensif juga dapat membantu penerima memahami tujuan program secara menyeluruh, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif dari bantuan yang diberikan.

Pemberdayaan Penerima Manfaat sebagai Strategi Penguatan Program

Pemberdayaan penerima manfaat adalah salah satu aspek penting dalam memperkuat efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia. PKH bertujuan untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, selain memberikan bantuan langsung berupa dana tunai, pemberdayaan penerima manfaat dalam bentuk pelatihan, peningkatan keterampilan, dan pendampingan juga sangat diperlukan untuk mencapai keberlanjutan program.

a. Pemberdayaan di Aras Mikro: Peran Pemberdayaan Individu

Pemberdayaan individu berfokus pada penguatan kapasitas penerima manfaat untuk mengelola bantuan yang mereka terima, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan, serta meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga. Salah satu contoh pemberdayaan yang diharapkan adalah membantu keluarga penerima manfaat (KPM) mengakses pelatihan keterampilan atau memulai usaha kecil untuk meningkatkan pendapatan mereka, sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan sosial.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ngatini, seorang ibu rumah tangga penerima PKH, menunjukkan bagaimana PKH dapat memberikan dampak positif terhadap pendidikan anak-anak dan kesehatan keluarga. Ibu Ngatini memanfaatkan bantuan PKH untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, meskipun bantuan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, Ibu Ngatini berharap ada dukungan lebih lanjut dalam bentuk pelatihan atau pendampingan yang dapat membantu keluarga seperti mereka menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Pemberdayaan Melalui Pelatihan dan Pendidikan Kewirausahaan

Salah satu fokus utama dari pemberdayaan mikro di Kota Medan adalah pemberian pelatihan dan pendidikan kewirausahaan kepada pelaku UMKM. Ibu N menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha mikro di Medan yang memiliki potensi besar, namun terkendala oleh keterbatasan pengetahuan dalam manajemen usaha, pemasaran, dan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, berbagai program pelatihan kewirausahaan telah digelar oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah.

Pelatihan ini mencakup berbagai aspek penting dalam menjalankan usaha mikro yang sukses, antara lain:

1. Mengajarkan bagaimana cara mengelola arus kas dan keuangan usaha secara efektif, agar pelaku UMKM dapat menghindari masalah keuangan yang seringkali menjadi penyebab utama kegagalan usaha.
2. Pelaku UMKM diberikan pelatihan tentang cara memasarkan produk mereka secara lebih efektif,

baik secara offline maupun online. Ibu N menyebutkan pentingnya mengenalkan pelaku usaha kepada platform digital, seperti media sosial dan e-commerce, untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

3. Pelatihan ini juga mencakup teknik untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan tren pasar dan kebutuhan konsumen, agar UMKM dapat bersaing dengan produk dari luar daerah bahkan internasional.

Akses Pembiayaan dan Modal Usaha

Keterbatasan modal adalah tantangan utama yang dihadapi oleh banyak pelaku usaha mikro. Ibu N menyebutkan bahwa program pemberdayaan di Medan juga sangat fokus pada memberikan akses kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat kurang memadai. Salah satu program yang telah diterapkan adalah, sebuah skema pembiayaan dari pemerintah yang menyediakan kredit dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman bank konvensional.

Namun, Ibu N juga menekankan bahwa selain KUR, banyak lembaga non-pemerintah yang turut berperan dalam memberikan akses pembiayaan mikro, seperti lembaga keuangan mikro dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Misalnya, ada juga lembaga yang memberikan pinjaman tanpa bunga atau dengan angsuran ringan bagi UMKM yang baru memulai usaha mereka. Menurut riset oleh Simamora (2020), keberadaan lembaga-lembaga ini sangat penting dalam membantu UMKM mengatasi hambatan modal yang sering kali menjadi penghalang utama bagi mereka untuk berkembang.

Penggunaan Teknologi Digital untuk Pemasaran dan Akses Pasar

Ibu N menjelaskan bahwa salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberdayaan UMKM di Kota Medan adalah pengenalan dan penggunaan teknologi digital, terutama dalam pemasaran. Pelaku usaha mikro di Medan seringkali masih mengandalkan metode pemasaran tradisional yang terbatas pada pasar lokal, seperti melalui pasar tradisional atau toko-toko fisik. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 dan pergeseran perilaku konsumen yang semakin mengarah ke digitalisasi, penting bagi UMKM untuk memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

Sebagai contoh, Ibu N menyebutkan inisiatif yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dalam bentuk pelatihan untuk memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Para pelaku UMKM diberikan pelatihan tentang cara membuat akun bisnis di platform seperti Instagram, Facebook, dan Tokopedia, serta cara mempromosikan produk mereka secara efektif menggunakan iklan digital. Program ini bertujuan untuk mengajarkan para pelaku UMKM agar mereka tidak hanya bergantung pada metode pemasaran konvensional, tetapi juga dapat memperluas pasar mereka ke tingkat nasional bahkan internasional. Ibu N juga membahas pentingnya pemanfaatan aplikasi keuangan digital untuk membantu pelaku UMKM mengelola transaksi dan memantau keuangan mereka dengan lebih efisien. Aplikasi-aplikasi seperti *Saku* atau *LinkAja* sangat membantu pelaku usaha dalam mempermudah transaksi jual beli tanpa harus menggunakan uang tunai, sehingga transaksi menjadi lebih transparan dan terpantau dengan baik.

Pembentukan Kelompok atau Komunitas Pengusaha

Selain pelatihan individual, pemberdayaan di bidang mikro di Medan juga mengedepankan pendekatan berbasis kelompok atau komunitas. Ibu N menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha mikro yang berhasil mengembangkan usahanya ketika mereka bergabung dalam kelompok atau komunitas pengusaha yang saling mendukung. Misalnya, di kawasan Medan Helvetia, terbentuk komunitas pengusaha yang fokus pada produk lokal seperti makanan dan kerajinan tangan. Melalui komunitas ini, para pelaku UMKM dapat saling berbagi pengalaman, informasi mengenai pemasaran, serta peluang kerja sama untuk memproduksi barang dalam jumlah besar dengan harga lebih murah.

Studi oleh Tanjung (2022) menunjukkan bahwa komunitas pengusaha di Medan memainkan peran penting dalam pemberdayaan mikro. Komunitas ini sering kali menjadi tempat berbagi pengetahuan, memasarkan produk bersama, serta membuka peluang kerja sama antar pelaku usaha yang lebih besar. Keberadaan kelompok atau komunitas ini tidak hanya memberikan pelatihan dan pendidikan kewirausahaan, tetapi juga memperkuat solidaritas antar pelaku usaha yang pada gilirannya meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Evaluasi dan Pengawasan Program Pemberdayaan

Evaluasi terhadap program pemberdayaan UMKM di Medan juga menjadi salah satu elemen

yang diperhatikan oleh pemerintah kota. Ibu N menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha mikro. Program pelatihan dan pendampingan yang diberikan tidak hanya berhenti pada sesi pelatihan awal, tetapi juga disertai dengan monitoring dan evaluasi berkala untuk melihat sejauh mana perubahan yang terjadi dalam usaha para peserta pelatihan.

Menurut (Simamora, 2020), pengawasan yang efektif dapat meningkatkan keberhasilan pemberdayaan UMKM, karena memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan umpan balik dan bimbingan lebih lanjut. Selain itu, pelaku usaha yang terlibat dalam program pemberdayaan harus diberi kesempatan untuk terus mengakses dukungan teknis dan sumber daya lainnya setelah program selesai, agar mereka dapat tetap berkembang secara berkelanjutan.

Proses Pemberdayaan Aras Mezzo (Kelompok) Pada Program Keluarga Harapan

Pemberdayaan masyarakat di tingkat makro mencakup berbagai inisiatif yang dirancang untuk mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan politik secara luas. Kota Medan, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, memiliki tantangan dan potensi besar dalam hal pemberdayaan masyarakat di tingkat makro. Berdasarkan wawancara dengan Bu N, yang memiliki pengalaman luas dalam berbagai program pemberdayaan di Kota Medan, kita dapat mengidentifikasi beberapa faktor penting yang menjadi dasar pemberdayaan di kota ini.

1. **Pemberdayaan Ekonomi di Kota Medan: Studi Kasus Pengembangan UMKM** Pemberdayaan ekonomi di Kota Medan berfokus pada pengembangan sektor usahamikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bu N menjelaskan bahwa salah satu strategi yang diterapkan adalah pelatihan kewirausahaan, pemberian akses permodalan, dan bantuan pemasaran untuk produk lokal. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Medan, sektor UMKM merupakan penyumbang terbesar terhadap perekonomian kota ini, dengan lebih dari 90% pelaku usaha berada dalam kategori UMKM (BPS Medan, 2023). Inisiatif ini sangat penting mengingat tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi, terutama di kalangan anak muda dan wanita. Sebagai contoh, program pemberdayaan ekonomi seperti "Medan Mandiri" yang diluncurkan oleh pemerintah kota memberikan pelatihan kepada ibu rumah tangga dan kelompok rentan untuk mengembangkan usaha rumahan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan modal terbatas. Inisiatif ini berhasil meningkatkan pendapatan keluarga dan menciptakan lapangan kerja baru, meskipun masih menghadapi kendala dalam hal akses pasar dan kualitas produk yang seringkali terbatas.
2. **Pemberdayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan** Salah satu fokus utama pemberdayaan di tingkat makro di Kota Medan adalah peningkatan kualitas pendidikan. Bu N menyebutkan bahwa pemerintah kota bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan NGO untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program "Medan Pintar" yang digagas oleh pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan beasiswa, pelatihan keterampilan, dan akses pendidikan tinggi bagi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Namun, meskipun ada beberapa upaya yang dilakukan, tantangan terbesar dalam pemberdayaan pendidikan adalah kesenjangan antara fasilitas pendidikan di daerah pusat kota dan pinggiran. Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), perbedaan kualitas fasilitas pendidikan antar kecamatan di Medan sangat besar, yang menyebabkan kesulitan dalam meningkatkan tingkat kelulusan dan kualitas pendidikan secara merata (Kemdikbud, 2022).
3. **Pemberdayaan Sosial dan Kesehatan: Fokus pada Penanggulangan Kemiskinan dan Kesehatan Masyarakat**

Pemberdayaan sosial dan kesehatan di Kota Medan melibatkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas hidup warga, terutama mereka yang berada di garis kemiskinan. Bu N mengungkapkan bahwa program-program seperti "Medan Sehat" yang berfokus pada pelayanan kesehatan gratis untuk keluarga miskin dan penguatan sistem jaminan sosial telah membantu mengurangi angka kematian bayi dan meningkatkan akses kesehatan bagi warga miskin. Selain itu, pemberdayaan sosial juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, dan pelatihan keterampilan hidup untuk keluarga yang terkena dampak sosial ekonomi. Studi dari Lembaga Penelitian Sosial Ekonomi (LPSE) menunjukkan bahwa meskipun terdapat program-program yang baik, banyak warga yang masih kesulitan dalam mengakses layanan sosial dan kesehatan karena keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai hak-hak mereka (LPSE, 2022). Hal ini menandakan pentingnya sosialisasi yang lebih intensif untuk memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan kesehatan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Kota

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kota menjadi aspek penting dalam pemberdayaan di Kota Medan. Bu N menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Pemerintah Kota Medan melalui program "Medan Partisipatif" berupaya melibatkan warga dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah tingkat kecamatan dan kelurahan. Program ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Namun, hasil survei dari Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik untuk melibatkan masyarakat, banyak warga yang masih merasa kurang berdaya atau tidak tahu bagaimana cara berpartisipasi dalam proses ini, terutama di daerah pinggiran. Ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal literasi politik dan pemahaman mengenai proses pembangunan.

Optimalisasi Program Keluarga Harapan melalui Reformasi Kebijakan

Dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan melalui PKH, reformasi kebijakan menjadi kunci utama. Bu N menyarankan bahwa perlu ada peningkatan dalam hal akurasi data penerima bantuan, sehingga bantuan lebih tepat sasaran. Hal ini penting untuk mengurangi terjadinya salah sasaran dan memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar membutuhkan bantuan. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial (Kemensos), kesalahan data penerima PKH di Medan masih cukup tinggi, yang menyebabkan sebagian keluarga yang lebih membutuhkan tidak tercakup oleh program ini (Kemensos, 2023).

Reformasi kebijakan juga dapat mencakup perubahan dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi program. Bu N mengusulkan untuk melibatkan lebih banyak pihak, baik dari sektor pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, dalam mengawasi jalannya program PKH. Di Kota Medan, koordinasi antara dinas sosial, instansi terkait, dan masyarakat perlu diperkuat untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan tujuan pemberdayaan yang telah ditetapkan. Menurut laporan dari Lembaga Studi Pembangunan Sosial (LSPS), salah satu kelemahan besar dalam pelaksanaan PKH di berbagai daerah adalah lemahnya pengawasan yang menyebabkan beberapa penerima bantuan tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, seperti untuk pendidikan dan kesehatan (LSPS, 2022).

Reformasi kebijakan PKH di Kota Medan juga harus mempertimbangkan integrasi dengan program-program lain yang lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam wawancara, Bu N menyebutkan bahwa beberapa keluarga penerima PKH di Medan mengeluhkan ketidakmampuan mereka untuk mengakses pasar atau mendapatkan modal usaha. Oleh karena itu, kebijakan yang mengintegrasikan PKH dengan akses terhadap pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, serta program pemberdayaan UMKM sangat diperlukan. Ini akan memberi keluarga penerima manfaat bukan hanya bantuan tunai, tetapi juga keterampilan dan peluang untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Sebuah studi kasus di Kabupaten Aceh Singkil menunjukkan bahwa kombinasi antara bantuan PKH dan pelatihan keterampilan serta akses ke pasar melalui pengembangan UMKM dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat (Bappenas, 2020). Program seperti ini dapat diadaptasi di Kota Medan, di mana banyak keluarga

masih bergantung pada bantuan sosial tanpa adanya peluang untuk meningkatkan penghasilan mereka secara mandiri.

Bu N juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam mengoptimalkan PKH di Kota Medan, yang memerlukan solusi kebijakan yang konkret. Salah satunya adalah masalah birokrasi yang lambat dan kurangnya transparansi dalam distribusi bantuan. Ini menyebabkan keterlambatan bantuan sampai kepada keluarga yang membutuhkan dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Untuk itu, Bu N menyarankan agar ada pembenahan dalam sistem distribusi dan pelaporan bantuan, serta penggunaan teknologi informasi yang lebih efektif untuk memastikan bantuan tepat waktu dan tepat sasaran.

Pemahaman yang rendah tentang bagaimana memanfaatkan bantuan PKH untuk tujuan pemberdayaan ekonomi masih menjadi hambatan di banyak keluarga penerima manfaat. Oleh karena itu, reformasi kebijakan yang menyertakan program pendampingan bagi keluarga penerima manfaat sangat penting. Pendampingan ini bisa berupa penyuluhan tentang cara mengelola bantuan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan dalam menjalankan usaha kecil dan menengah yang bisa dilakukan di rumah.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa program ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Implementasi PKH di Kota Medan menunjukkan adanya manfaat langsung bagi keluarga penerima manfaat, terutama dalam membantu mereka memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dan memperoleh layanan kesehatan yang sebelumnya sulit diakses. Hal ini terlihat dari temuan bahwa mayoritas keluarga penerima manfaat memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan dasar, seperti biaya sekolah dan kesehatan.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan adanya berbagai tantangan yang menghambat efektivitas program, termasuk keterlambatan pencairan dana, ketidaktepatan sasaran, dan kurangnya pendampingan yang intensif bagi penerima manfaat. Meskipun program ini dirancang untuk mendukung kemandirian ekonomi keluarga miskin, realitas pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan cenderung berfokus pada kebutuhan jangka pendek tanpa adanya strategi pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Akibatnya, ketergantungan pada bantuan sosial tetap menjadi isu yang perlu ditangani secara sistematis. Ketepatan sasaran penerima manfaat juga menjadi tantangan besar, sebagaimana ditemukan bahwa data penerima manfaat sering kali tidak mutakhir, sehingga beberapa keluarga yang layak justru tidak terdaftar, sementara penerima yang tidak memenuhi kriteria tetap menerima bantuan. Selain itu, minimnya transparansi dalam pengelolaan dan distribusi bantuan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penerima manfaat, yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap program ini.

Untuk meningkatkan efektivitas PKH di Kota Medan, diperlukan pembaruan data secara berkala, optimalisasi pelatihan dan peran pendamping PKH, serta integrasi program dengan inisiatif pemberdayaan ekonomi lainnya seperti pelatihan kewirausahaan dan akses modal usaha. Selain itu, sistem pengawasan yang lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam evaluasi program juga penting untuk memastikan bantuan mencapai keluarga yang benar-benar membutuhkan. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun PKH memiliki potensi besar dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pelaksanaan yang lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut, PKH dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kota Medan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di masa yang mendatang.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (Bps) Kota Medan. (2023). *Laporan Ekonomi Kota Medan 2023*. Medan: Bps.
- Badan Pusat Statistik (Bps) Medan. (2023). *Statistik Umkm Kota Medan*. Bps Medan. Bappenas. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pkh Dan Umkm: Studi Kasus Di Aceh Singkil*. Jakarta: Bappenas.
- Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative Methods In Social Research*. Boston: Mcgraw-Hill.
- Kaban, P. T. W. (2021). *Analisis Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Sektor Pendidikan Di*

- Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.*
- Fadhillah, Rizka Anggun, Sugianto, Y. M. (2015). *Pengaruh Kompetensi, Motivasi Dan Komitmen Terhadap Efektivitas Kerja Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Deli Serdang.*
- Karina, K. (2019). *Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Menekan Angka Kemiskinan Di Kelurahan Belawan Ii Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.* Jurnal Publik Reform Undhar Medan
- Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos). (2023). *Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Kota Medan.* Jakarta: Kemensos.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemdikbud). (2022). *Laporan Kesenjangan Pendidikan Di Kota Medan.* Jakarta: Kemdikbud.
- Kemit, J. F. (2024). *Analisis Regulasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai: Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan.* *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 49–53.
- Lembaga Penelitian Sosial Ekonomi (Lpse). (2022). *Tantangan Pemberdayaan Sosial Di Kota Medan.* Medan: Lpse.
- Lembaga Studi Pembangunan Sosial (Lsps). (2022). *Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Di Indonesia.* Jakarta: Lsps.
- Novi, A. H. B. (2020). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ropang.* Jurnal Ekonomi Dan Bisnis
- Pusat Studi Kebijakan Sosial (2021). *Pemanfaatan Pkh Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Malang.* Malang: Psks.
- Syaifullah. (2008). *Memahami Pendidikan Kewarganegaraan.* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suara Usu. (2024). *Optimalisasi Penerimaan Bantuan Sosial Pkh Oleh Dinas Sosial Kota Medan Melalui Graduasi Dan Penataan Pemutakhiran Data.* Retrieved From Suarausu.Or.Id.
- Sugiyono.(2011). *Metode Penelitian Pendidikan.* Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Yulia, S. T (2023). *Pengaruh Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Barat.* *Regress: Journal Of Economics & Management*